

AKULTURASI DAN ASIMILASI DALAM KONTEKS INTERAKSI ANTAR ETNIK

Oleh:

H. Khomsahrial Romli[✉]

Abstrak

Acculturation and assimilation are two very important concepts in sociology and anthropology that describe cross cultural effects on both minorities as well as majorities in societies that are multi ethnic and multi cultural in nature. There are two different views about the tendencies of acculturation and asimiliasi in the context of inter-ethnic interaction. Two trends that view is constructed two models of ethnic identity, ethnic Exclusive and Inclusive. Exclusive assess ethnicity as ethnic tribes should be given priority, assess ethnic inclusive as a rival, and that sometimes, hampering the progress of ethnic for acculturation and assimilation. Because of exclusive ethnic tend to keep a distance, on the contrary, the inclusive one judge himself has an equal position to the other.

Kata Kunci: *akulturasi, asimilasi, interaksi, etnik*

A. Pendahuluan

Akulturasi dan asimilasi merupakan dua dari sekian konsep yang dikenal di saat seseorang memperbincangkan tentang relasi antaretnik atau interaksi dan komunikasi antara dua komunitas atau individu yang berbeda budaya. Konsep akulturasi dan asimilasi dimaknai tidak seragam oleh para pakar dan ilmuwan. Diantara mereka memberi definisi dan pemaknaan serta pengimplementasian yang beragam.

[✉]Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.

Subkomite tentang akulturasi yang ditunjuk Dewan Penelitian Ilmu Sosial (*the Social Science Research Council*) yang terdiri dari Robert Redfield, Ralph Linton, dan Melville J. Herskovits mendefinisikan akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung, perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok.¹ Mulyana menilai bahwa definisi tersebut masih umum, dalam arti bahwa isi tidak merinci derajat perubahan kelompok-kelompok tersebut, baik secara personal, sosial atau pun struktural.

Mulyana menganggap bahwa definisi akulturasi itu merupakan definisi otoritatif yang telah menjadi inspirasi bagi ilmuwan lainnya untuk memberikan definisi akulturasi yang serupa, yaitu bahwa akulturasi adalah suatu bentuk perubahan budaya yang diakibatkan oleh kontak kelompok-kelompok budaya, yang menekankan penerimaan pola-pola dan budaya baru dan ciri-ciri masyarakat pribumi oleh kelompok-kelompok minoritas.²

Akulturasi menurut Kim merupakan bentuk *enkulturasi* (proses belajar dan penginternalisasian budaya dan nilai yang dianut oleh warga asli) kedua. Kim mendefinisikan akulturasi sebagai suatu proses yang dilakukan imigran untuk menyesuaikan diri dengan dan memperoleh budaya pribumi, yang akhirnya mengarah kepada asimilasi.³

Makna dan posisi akulturasi dalam konteks realitas antara etnik semakin jelas ketika mengemukakan makna asimilasi. Park dan Burgess mengatakan bahwa: Asimilasi adalah suatu proses interpretasi dan fusi. Melalui proses ini orang-orang dan kelompok-kelompok memperoleh memori-memori, sentimen-sentimen, dan sikap-sikap orang-orang atau kelompok-kelompok lainnya, dengan berbagai pengalaman dan sejarah, tergabung dengan mereka dalam suatu kehidupan budaya yang sama.⁴

Definisi dan pemaknaan asimilasi itu mencerminkan adanya relasi antara dua kelompok, di mana satu kelompok sebagai

¹Dalam Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Komunikasi Antarbudaya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 159

² *Ibid.*, h. 159

³ *Ibid.*, h. 139

⁴ *Ibid.*, h. 160

komunitas pribumi yang biasa dominan dan mayoritas dengan satu kelompok minoritas yang biasanya merupakan komunitas atau individu pendatang atau migran. Dalam kondisi seperti ini biasanya kelompok minoritas secara bertahap akan kehilangan identitas dirinya. Dalam proses reduksi identitas di saat asimilasi berlangsung, menurut Jiobu dapat memunculkan dua kemungkinan akibat dari asimilasi, yaitu:

- 1) Kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas. Dalam proses itu kelompok mayoritas tidak berubah.
- 2) Kelompok minoritas dan kelompok mayoritas bereampur secara homogen_ Masing-masing kelompok kehilangan keunikannya, lalu muncul suatu produk unik lainnya, suatu proses yang disebut Belanga Pencampuran (*Melting Pot*).⁵

Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas.⁶ Menurut Danadjaya, proses pembauran suatu budaya biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu; asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas satu arah yaitu seseorang atau kelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok itu. Asimilasi tuntas dua arah dapat berlangsung manakala dua atau lebih kelompok etnik saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik.

Beberapa ilmuwan membedakan asimilasi ke dalam beberapa dimensi. Gordon misalnya, membedakan tujuh dimensi asimilasi, yakni: asimilasi kultural atau perilaku (akulturasi), struktural, marital, identifikasional, penerimaan sikap, penerimaan perilaku, dan kewarganegaraan. kultural atau akulturasi ditandai dengan perubahan pada pola-pola budaya kelompok minoritas seperti bahasa, nilai, pakaian, dan makanan. Sementara asimilasi struktural ditandai dengan masuknya kelompok minoritas ke dalam

⁵ Robert M. Jiobu, *Ethnicity and Assimilation*, (New York: State Univ of New York Pr , 1988), h. 6

⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983), h. 38
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

klik, klub, dan lembaga masyarakat pribumi.⁷

Penjelasan tentang dimensi asimilasi seperti itu menurut Mulyana memungkinkan untuk dikatakan bahwa akulturasi adalah suatu subproses asimilasi; is mengisyaratkan penggantian bertahap ciri-ciri budaya kelompok minoritas oleh ciri-ciri masyarakat pribumi. Namun akulturasi juga menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri asli mereka dan membuang ciri-ciri lainnya, sementara pada saat yang sama mereka juga mungkin menerima sebagian ciri budaya dominan dan menolak ciri-ciri lainnya.⁸

Asimilasi dan akulturasi memang merupakan dua konsep yang sering muncul dalam wacana relasi antaretnik. Kedua konsep tersebut selalu terkait antara satu dengan yang lainnya. Kim mengatakan bahwa asimilasi merupakan derajat tertinggi akulturasi. Di tengah keterkaitan antara asimilasi dan akulturasi tersebut, dalam batas-batas tertentukeduanya memiliki aspek perbedaan.⁹ Mulyana misalnya menilai bahwa akulturasi merupakan proses dua arah, sedangkan asimilasi merupakan proses satu arah.¹⁰

Ilmuwan lainnya terkadang tidak membedakan dua konsep tersebut. Gillin dan Gillin misalnya, memparalelkan dua konsep tersebut di saat menjelaskan kemungkinan munculnya. Menurut Gillin dan Gillin mengatakan bahwa asimilasi dan akulturasi dapat terjadi apabila adanya: (1) kesetian dan keserasian sosial; (2) kesempatan dalam bidang ekonomi; (3)persamaan kebudayaan; (4) perkawinan campur; dan (5) adanya ancaman dari luar.¹¹

Dalam konteks penelitian ini, konsep akulturasi dan asimilasi merupakan dua konsep yang relevan untuk menjadi salah satu asumsi teoritik dan konseptual dalam melihat realitas interaksi etnik.. Di samping itu, akulturasi dan asimilasi merupakan dua realitas yang mungkin terjadi di saat kedua etnik tersebut berinteraksi dan berkomunikasi.

⁷Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Op. Cit.*, h. 161

⁸*Ibid.*, h. 162

⁹*Ibid.*, h. 139

¹⁰*Ibid.*, h. 159

¹¹Gillin and Gillin, *Cultural Sociology: A Revision and of an Introduction to Sociology*, (New Yorl: The Macmillan Company, 1954), h. 487

B. Pembahasan

1. Interaksi sosial dalam Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk (*plural society*) menurut Garna terkait dengan dua konsep dasar, yaitu:

...1) keragaman etnik adalah suatu keadaan yang mampu memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan di antara kelompok masyarakat yang bergabung atau disatukan, rasa menyatu melalui dasar kesetiaan, pemilihan nilai bersama dan pembagian kekuasaan, 2) masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras dan etnik yang berbeda di bawah suatu sistem pemerintahan dan paksaan.¹²

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik dan tentu dapat dikategorikan sebagai masyarakat majemuk. Beragam etnik mendiami bumi Indonesia, yang dalam satu daerah setiap individu yang berbeda etnik berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemajemukan kehidupan masyarakat inilah yang senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia.

Berghe membuat klasifikasi dalam beberapa ciri yang mendasari masyarakat majemuk sebagai berikut:

“1) kekuatan konsensus nilai-nilai, 2) beranekaragam kebudayaan, 3) mudah terjadi pertentangan, 4) diperlukan saling paksaan dan saling ketergantungan dalam ekonomi sebagai syarat integrasi sosial, 5) terjadi dominasi politik oleh golongan tertentu, dan 6) relasi antar kelompok lebih merupakan secondary segmental, sedangkan relasi dalam kelompoknya lebih merupakan hubungan primary”.¹³

¹²Garna Judistira K, *Ilmu-ilmu Sosial Dasar Konsep, Posisi*, (Bandung : Program Pascasarjan UNPAD, 1996), h. 145

¹³Dalam Dirk Veplun, *Interaksi Sosial Komunitas Beragam Etnik di Teluk Humboldt Kota dan Kabupaten Jayapura Irian Jaya*, (Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 2004), h. 73

Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara plural dari segi etnik dengan beragam ciri dan karakter sebagaimana yang diungkapkan Berghe itu, membutuhkan pengertian dan kearifan yang tinggi pada setiap masyarakatnya untuk secara lebih bijak bergaul dan berinteraksi dengan sesama warga masyarakat yang berbeda budaya dan etnik. Tanpa kearifan dan kerelaan untuk menerima perbedaan, maka akan timbul disharmoninya hubungan di antara mereka. Keragaman etnik itu juga yang membuat pola dan corak hubungan di antara masyarakat Indonesia terlihat begitu beragam.

Royle menyebut tiga faktor yang menentukan corak hubungan antara suku dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Ketiga faktor itu adalah (1) kekuasaan (*power*): (2) persepsi (*perception*) : dan (3) tujuan (*purpose*).¹⁴ *Kekuasaan* sebagai salah satu faktor yang menentukan corak hubungan antarsuku berkaitan dengan dominasi kelompok (*group*). Dominasi ditentukan oleh demografi, politik, dan budaya lokal, seperti masyarakat pendatang yang berada di Bandung dengan berbagai kepentingan selalu berusaha untuk melakukan gaya, logat, tradisi, dan nilai-nilai Sunda. Upaya ini adalah sebagai langkah untuk mempermudah dan melanggengkan interaksi sosial para pendatang lama berada di wilayah demografi, politik dan budaya orang Sunda.

Faktor *persepsi* (baik jangka panjang maupun insidental) juga sangat menentukan bentuk hubungan antara suku. Persepsi seseorang atau kelompok tentang suku dan kelompok yang lain seringkali bias, karena seseorang selalumenggunakan *frame* dan kerangka pikir sukunya sendiri. Di samping itu, pembiasan juga disebabkan oleh adanya "stereotip" pada diri seseorang atau kelompok. Stereotip merupakan suatu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sikap dan watak pribadi orang, golongan lain yang umumnya bercorak negatif. Stereotip pada umumnya cenderung mengarah kepada sikap negatif terhadap orang lain. Dalam konteks komunikasi antarbudaya, stereotip merupakan suatu sikap yang selalu menghambat efektivitas komunikasi.

Faktor ketiga yang menentukan corak hubungan antar suku

¹⁴Usman Pelly, "Masalah Batas-Batas Bangsa" dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 54 Tahun 1998, h. 25

adalah faktor *tujuan* dan kepentingan. Kepentingan yang sama di antara suku yang ada akan membuat hubungan mereka bisa akur. Sebaliknya adanya kepentingan yang berbeda apalagi bertolak belakang dapat merangsang timbulnya konflik antar suku. Dengan demikian, selama manusia masih memiliki tujuan dan kepentingan, maka selama itu pula hubungan di antara manusia akan senantiasa diwarnai oleh suasana akur dan konflik.

Tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar suku itu melahirkan tiga pola hubungan (interaksi) yakni (1) kerjasama; (2) persaingan; dan (3) konflik. Ketiga pola tersebut menurut Anto Achdiat dilandasi oleh beberapa faktor:

Pertama, perebutan sumber daya yang terbatas dan berharga di antara golongan etnik akan menyebabkan munculnya kerjasama, kompetisi, dan konflik. Dalam perebutan sumber daya tersebut sangat jarang terjadinya kerjasama. Kompetisi pun terjadi ketika adanya aturan-aturan yang ketat dari suatu institusi yang terkait dengan sumber daya tersebut. Konflik senantiasa mewarnai setiap perebutan sumber daya apa pun di republik ini, mulai dari sumber daya yang kecil seperti lahan parkir, hingga proyek-proyek besar dengan jumlah uang yang cukup menjanjikan.

Kedua, peranan seseorang atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang menyebabkan adanya kerjasama, kompetisi, dan sengketa. Setiap orang atau kelompok mempunyai andil untuk menciptakan ketiga pola hubungan di atas. Kerjasama bisa terjadi apabila seseorang dapat menjadi fasilitator di antara dua atau lebih suku dengan senantiasa mengkomunikasikan, atau mempertemukan suku-suku yang ada untuk bekerjasama dan memecahkan persoalan yang ada di antara mereka. Di samping itu, seseorang atau kelompok dapat juga menciptakan kompetisi di antara suku, baik kompetisi yang sehat maupun yang tidak. Sengketa (konflik) antar suku yang terjadi di Indonesia antara lain diprovokasi oleh seseorang atau kelompok, sehingga orang atau kelompok seperti ini dikenal dengan julukan provokator.

Ketiga, model-model pengetahuan kebudayaan masing-masing warga masyarakat dan kelompok etnik yang digunakan untuk memahami dan melakukan tindakan. Kebudayaan dan tradisi yang berbeda di antara suku bangsa yang ada sangat memungkinkan terjadinya kesalahpahaman di antara mereka. Pemahaman yang benar atas budaya dan tradisi suku yang lain

adalah modal bagi terwujudnya kerjasama antar suku. Sebaliknya kompetisi (terutama kompetisi yang tidak sehat) dan konflik bisa terjadi karena persepsi dan pemahaman yang tidak tepat terhadap budaya dan tradisi kelompok atau suku yang lain.

Tiga pola hubungan antara etnik yang telah digambarkan itu, dalam perwujudannya dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi misalnya, Kusuma Hadiningrat (Suparlan, 1984) dalam penelitiannya tentang hubungan antara etnik pada bidang ekonomi di Pekanbaru Riau menemukan adanya kecenderungan bahwa setiap rumah makan Minang untuk mempekerjakan orang dari Minang sebagai karyawannya. Kebijakan ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Dengan merekrut tenaga kerja dari suku yang sama, maka dapat menekan tingkat konflik yang terjadi dalam perusahaan, karena setiap persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Di samping itu faktor bahasa dan budaya juga menjadi pertimbangan tersendiri. Faktor yang abstrak (tersembunyi) dari kasus tersebut adalah karena adanya stereotip dari orang Minang terhadap suku lain di Pekanbaru.

Interaksi yang berlangsung dalam masyarakat yang majemuk memiliki bentuk dan karakter yang beragam. Setiap individu mempunyai cara dan gaya interaksi yang berbeda, yang oleh Hall (1990: 23) membaginya dalam empat jarak yang mengindikasikan tingkat hubungan seseorang dalam berinteraksi, yaitu; jarak intim (*intimate distance*), jarak pribadi (*personal distance*), jarak sosial (*social distance*) dan jarak publik (*public distance*). Jarak intim mengindikasikan kedekatan yang ditandai dengan hubungan fisik. Jarak pribadi dapat dijumpai seperti dalam hubungan antara suami-istri. Sementara itu jarak sosial biasanya berlangsung dalam hubungan formal dan informal, sedangkan jarak publik biasanya tergambar dalam suasana komunikasi dan interaksi antara pembicara dengan pemirsa melalui media elektronik.

Dalam konteks interaksi antara individu atau masyarakat yang berbeda etnik dalam suatu komunitas wilayah tertentu yang merupakan ciri masyarakat majemuk, biasanya berlangsung proses adaptasi, asimilasi, dan juga konflik. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri seseorang dengan lingkungan sebagai konsekuensi dari pengorganisasian penduduk. individu yang hidup dalam

komunitas majemuk sangat diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi untuk mempertahankan eksistensi dirinya.

Menurut Simmel, konflik sosial merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dan muncul dalam interaksi sosial, di samping bentuk hubungan lainnya seperti akomodasi, kerjasama dan kompetisi. Konflik sosial yang berlangsung dalam komunitas majemuk tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor internal individu seperti watak dan kepribadian serta konflik-konflik kepentingan subjektif dari setiap individu tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti yang menyangkut kebijakan.¹⁵ Dalam konteks ini, pembangunan yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal misalnya akan memunculkan prasangka negatif dari kelompok yang tidak mampu berperan. Hadirnya kegiatan ekonomi besar yang padat modal yang cenderung eksploitatif cenderung menekan perekonomian tradisional dan mengabaikan kepentingan penduduk setempat (Smith, 1987: 134; dan Hansen, 1981: 65). Dalam posisi seperti inilah eksistensi penduduk lokal (asli) menjadi 'dilematis', yang di satu sisi mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan akselerasi pembangunan, sementara di sisi lain kebijakan pembangunan harus jalan terus karena tuntutan kompetisi global.

2. Identitas Etnik

Setiap manusia memiliki identitas, dan identitas manusia itu dapat beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi tempat mereka berada. Seseorang bisa beridentitas sebagai ayah ketika berada di dalam rumahnya, dan dapat beridentitas sebagai tukang sapu pada saat menjalankan tugasnya di kantor. Hal itu hanyalah dua cara untuk menentukan identitas seseorang. Terdapat banyak cara lainnya yang bisa digunakan untuk itu, seperti Fisher dkk yang menyebut empat cara untuk memahami identitas, yaitu; latar belakang (identitas yang diwarisi seperti warga negara, agama, dan lainnya); peran (peran dan posisi yang seperti ibu, bapak, direktur, dan lain-lain sebagainya); kekerabatan (siapa kita pada saat menikmati waktu luang seperti pionis, pendaki gunung, dan lainnya); dan sasaran (apa yang menjadi cita-cita dan yang ingin

¹⁵George Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations*, translated by Kurt H. Wolff and Renhard Bendix, (Illionis: The Free Press, 1955), h. 40
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

kita capai dalam hidup).¹⁶

Identitas seseorang selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga diberikan (dijuluki) oleh orang lain (baik atas persetujuan kita maupun tidak). Menurut Berger dan Luckmann, identitas merupakan suatu unsur dari kenyataan subjektif dan identitas selalu berhubungan secara dialektif dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malah dibentuk ulang oleh hubungan sosial. Oleh karena itu, identitas pada diri seseorang bukan hanya berkaitan dengan keinginan atau kesadaran subjektifnya, namun juga berhubungan dengan legitimasi eksternal dari lingkungannya.¹⁷

Berangkat dari dua jenis pemaknaan identitas tersebut, Berger dan Luckmann menyebut dua jenis identitas, yaitu identitas objektif dan identitas subjektif. Identitas objektif dimaknai sebagai identitas yang berasal dari legitimasi struktur kemasyarakatan dan telah menjadi pengetahuan umum mayoritas masyarakat. Identitas sudah dirancang dengan sangat seksama, dalam arti dapat mencerminkan sepenuhnya kenyataan objektif di mana identitas itu berada. Identitas subjektif dimaknai sebagai identitas yang didasarkan atas pemaknaan subjektif dari yang memiliki identitas.¹⁸

Sikap dan perilaku seseorang dalam lingkungan sosialnya akan dipengaruhi oleh identitas apa yang melekat dalam dirinya. Di samping itu, pemahaman seseorang terhadap identitas individu atau kelompok yang lain merupakan dasar dan acuan dalam berinteraksi. Seseorang memperlakukan orang lain atas dasar identitas yang mereka ketahui tentang orang tersebut. Konflik yang terjadi dalam masyarakat sedikit banyak disebabkan oleh peng-identitas-an yang salah oleh seseorang atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya.

Etnik adalah salah satu bentuk kategori identitas berdasarkan Tatarbelakang kesukuan. Batasan kelompok etnik

¹⁶Simon Fisher, dkk., *Mengelolah Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Indonesia: SMK Grafika Desa Putra, 2001), h. 46

¹⁷Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 248

¹⁸*Ibid.*, h. 235

menurut Barth (1988) sangat ditentukan oleh batas-batas dan ciri khas yang ditetapkan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya sendiri. Suseno (1992: 56) mengatakan bahwa identitas (etnik) merupakan suatu nilai kemasyarakatan yang dipaksakan begitu saja untuk diterima kepada para pendukung kebudayaan pada masa-masa formatif clari usia mereka. Identitas (etnik) lanjut Suseno, bersifat askriptif sebab dengan identitas seseorang diklasifikasikan atas identitasnya yang paling umum dan mendasar yaitu berdasarkan atas tempat atau asalnya.

Di samping indikator penentuan etnik sebagaimana yang dikemukakan oleh Suseno di atas, Narroll juga menyebut beberapa kriteria yang dijadikan oleh sekelompok orang untuk mengidentifikasi kelompok etniknya, yaitu:

- a) Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan
- b) Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya
- c) Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri
- d) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.¹⁹

Setiap kelompok memberi batasan-batasan tersendiri tentang identitas dan karakter etniknya masing-masing. Dengan batas-batas tersebut, menurut Barth, setiap anggota kelompok dapat mengidentifikasi mana kelompok etniknya dan mana kelompok etnik lain. Nilai-nilai etnik yang dijalankan oleh setiap anggota kelompok menjadi pertanda untuk membedakan identitas setiap etnik. Identitas etnik berhubungan dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya sehingga dalam berinteraksi dengan individu lainnya identitas etnik akan muncul, dan identitas tersebut biasanya dipertahankan oleh etnik tersebut. Ciri-ciri penting suatu kelompok etnik menurut Barth adalah askripsi yang diberikan kelompok dalam dan kelompok luar, memandang kelompok etnik sebagai suatu jenis organisasi social tempat para aktor menggunakan

¹⁹Dalam Fredrik Barth (ed.), *Kelompok Etnik dan Batasannya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), h. 11
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

identitas-identitas etnik untuk mengkategorikan diri mereka dan orang-orang lain untuk tujuan interaksi.²⁰

C. Kesimpulan

Terdapat dua kecenderungan pandangan yang berbeda tentang akulturasi dan asimiliasi dalam konteks interaksi antar etnik. Dari dua kecenderungan pandangan tersebut dikonstruksi dua model identitas etnik, yaitu; Etnik Eksklusif dan Etnik Inklusif. Etnik Eksklusif menilai etniknya sebagai suku yang harus diberi prioritas, dan menilai dan memposisikan etnik inklusif sebagai rival dan yang terkadang menghambat kemajuan etnik untuk akulturasi dan asimilasi. Karena etnik eksklusif cenderung menjaga jarak, sebaliknya, Etnik Inklusif menilai dirinya memiliki posisi yang setara dengan yang lain.

Daftar Pustaka

- Allport, W. Gordon, *The Nature of Prejudice*, New York: Double Anchor Books, 1958.
- Barth, Fredrik (ed.), *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven J., *Introduction to Qualitative Research Methods, A Phenomenological Approach to the Social Science*, Canada: John Wiley & Sons. Inc., 1975
- Capozza, Dora dan Brown, Rupert, 2000, *Social Identity Processes*, London: SAGE Publications
- Cresswell, W, John, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*, California: Sage Publications, Inc., 1998
- Danandjaya, James, *Wacana Antropologi*, Media Komunikasi Peminat dan Profesi Antropologi. No. 3 Thn. II Nopember-Desetnber, 1998
- Fisher, Simon dkk., *Mengelolah Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Indonesia: SMK Grafika Desa Putra, 2001

²⁰Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Op. Cit.*, h. 156
Jurnal Pengembangan Masyarakat

- Judistira K. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Primaco Akademika, *Metoda Penelitian; Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Primaco Akademika, 1999.
- Gitlindan Gitlin, *Cultural Sociology*, New York: Macmillan Companyinssen, 1954
- Gary, *Argicultural and Rural Development in Indonesia*, Boulder Colorado: Wetview Press, 1981
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan dan Mentalitas dalam Pembanzurian*. Jakarta: PT. Gramedia, 1985
- Liliweri, Alo, *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Mulyana, Deddy, *Komunikasi Efektif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- , *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Petty, Unman, *Hubungan Antara Kelompok Etnis*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2004
- Ritzer, Goerge & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Terjemahan Alimandan, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rogers, Everett M., Thomas M. Steinfatt, *Intercultural Communication*. Illinois, Waveland Press, Inc., 1999
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2003
- Spradley, James P., *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997